

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang perubahan institusi pemerintahan di Yogyakarta sebagai dampak dari Reorganisasi Agraria pada awal abad ke-20. Terdapat dua poin pokok yang dibahas mengenai reorganisasi agraria dalam tesis ini, yaitu tentang relasi antara agraria dan tata kelola air. Penelitian ini menelusuri sejarah kelembagaan irigasi di Yogyakarta melalui pendekatan *historical institutionalism*. Kelembagaan irigasi di Yogyakarta merupakan bagian dari proses kontestasi antara negara, pasar dan masyarakat di tengah perubahan kebijakan agraria di Yogyakarta tahun 1918. Penelitian ini menempatkan dimensi kelembagaan sebagai kajian utama penelitian untuk dapat melihat dinamika ekonomi dan politik di dalamnya perubahan kelembagaan di dalamnya yang telah dimulai sejak era tanam paksa (1830-1870) hingga politik etis (1910-1930).

Untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana tata kelola irigasi di Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian historis untuk melihat keterkaitan kelembagaan pengairan pada era kolonial pada era politik etis. Tujuan utama sebagai turunan dari rumusan masalah di atas adalah untuk memahami bagaimana perubahan agraria dan tata kelola air berpengaruh terhadap institusi politik di Yogyakarta. Data-data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan arsip-arsip Kolonial hingga Dinas-Dinas Pertanian, Pengairan dan Pertanahan.

Hasil dari penelitian ini adalah irigasi modern mulai diintrodusir Pemerintah Kolonial di Yogyakarta pada era awal Politik Etis dengan tujuan dominasi ekonomi.. Dengan pelebagaan *Waterschap*, modernisasi mulai dilakukan yang bersamaan dengan Reorganisasi Agraria di wilayah Yogyakarta yang mengurangi otoritas Kesultanan Yogyakarta (era HB VII dan HB VIII). Sementara itu, institusi kolonial justru semakin mendominasi di sektor ekonomi dan politik.

Kata Kunci: Agraria, Pengairan, Irigasi, *ulu-ulu*, *Waterschap*

ABSTRACT

This thesis discusses the changes in government institutions in Yogyakarta as a result of the Agrarian Reorganization in the early 20th century. There are two main points discussed regarding agrarian reorganization in this thesis, namely regarding the relationship between agrarian and water governance. This study traces the history of irrigation institutions in Yogyakarta through a historical institutionalism approach. Irrigation institutions in Yogyakarta are part of the process of contestation between the state, market and society in the midst of changes in agrarian policies in Yogyakarta in 1918. This study places the institutional dimension as the main study of research to be able to see the economic and political dynamics within the institutional changes that have started from the era of forced cultivation (1830-1870) to ethical politics (1910-1930).

To answer the formulation of the problem on how to manage irrigation in Yogyakarta, this study uses a historical research methodology to look at the interrelationships of irrigation institutions in the colonial era in the era of ethical politics. The main objective as a derivative of the problem formulation above is to understand how agrarian changes and water governance affect political institutions in Yogyakarta. The data used in this study are based on Colonial archives to the Agriculture, Irrigation and Land Offices.

The result of this research is that modern irrigation began to be introduced by the Colonial Government in Yogyakarta in the early era of Ethical Politics with the aim of economic domination. VIII). Meanwhile, colonial institutions increasingly dominated the economic and political sectors.

Keywords: *Agrarian, Irrigation, Ulu-ulu, Waterschap*